

# EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN MAMUJU UTARA

**Mansur**

*Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*The objective of this study is to evaluate the extent of policy effectiveness retribution building permits (IMB) in Mamuju utara regency. Data Collection was done by using observation and in-depth interviews, while the technique of data analysis include data reduction, display the data and draw conclusions and verification using qualitative descriptive analysis. The results showed the retribution policy performance of building permits (IMB) in Mamuju utara regency has not two aspects of evaluation criteria is performing well or which, in common criteria and the criteria accuary. While the four aspects of evaluation criteria is not maximized performance criteria of effectiveness, efficiency, Adequacy, and responsiveness. From local regulation number 27 of 2011 concerning the retribution of building permits due to lack of. Socialization to the people who made the implementor. lack of supervision and weak enforcement of sanctions for people who violate the provisions of the policy of building permit retribution.*

**Keywords:** *Policy Evaluation, effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, appropriateness, IMB.*

Pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. merupakan rujukan sebuah daerah otonom dalam menata dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan laju pertumbuhan Pembangunan Nasional dan bertambahnya daerah Otonomi baru, dan salah satunya adalah Kabupaten Mamuju Utara. sejak ditetapkannya sebagai Daerah Otonom melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang pembangunan dan ekonomi dan berbanding

lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan jumlah bangunan yang didirikan oleh masyarakat. tentunya memerlukan penataan dan pengendalian sedini mungkin karena sangatlah berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota Pasangkayu di masa mendatang.

Dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memacu pembangunan di daerah khususnya di mamuju utara dituntut berbagi kebijakan dan upaya yang kongkrit dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna mengantisipasi tuntutan akan kebutuhan pelayanan kepada Masyarakat. Usaha tersebut dapat dilakukan apabila didukung dengan kebijakan yang proporsional. Sehingga tercipta keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata ruang di setiap sudut wilayah. demikian halnya dengan pengembangan pembangunan tata ruang wilayah yang dilakukan di Kabupaten Mamuju Utara.

Berdasarkan hal di atas, untuk mewujudkan tujuan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Utara, maka ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah. penataan ruang merupakan

instrumen penting bagi pemerintah sehingga penetapan rencana harus mendapat kesepakatan dan pengesahan oleh lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Sehingga kebijakan yang dimaksud secara legal mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri, sehingga diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten.

Oleh karenanya dalam mewujudkan penataan ruang yang proporsional di Kabupaten Mamuju Utara. Pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai wujud pengendalian terhadap laju pembangunan yang dilakukan masyarakat guna menata ruang dan lingkungan agar tercipta keserasian dan keseimbangan. dalam rangka penyusunan tata ruang wilayah yang baik. Penerbitan Peraturan daerah Nomor 27 Tahun 2011 memiliki hubungan yang erat dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Mamuju Utara.

Izin Mendirikan Bangunan merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau merubah suatu bangunan yang dimaksud agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini merupakan alternatif untuk mengatur tentang pendirian bangunan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai individu atau kelompok usaha. Pengaturan pendirian bangunan ini dilakukan untuk membantu dalam merealisasikan rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan perencanaan RTWR. Karena pemberian izin mendirikan bangunan akan berimplikasi pada pengembangan struktur

ruang didasarkan pada perkembangan setiap komponen kegiatan yang ada untuk mendukung dan mewujudkan terciptanya Visi dan Misi kabupaten mamuju utara yang smart.

Mengevaluasi kebijakan saat ini yang berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses analisis dalam sebuah program atau kebijakan publik. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihailkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan atau program, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan publik yang sedang diterapkan dapat melahirkan rekomendasi bagian-bagian mana saja dari kebijakan yang sedang beroperasi harus dipertahankan, diperkuat dan diubah. Jika kebijakan atau program yang ada dipandannng tidak efektif secara menyeluruh, maka kebijakan tersebut perlu direvisi ataupun di ganti.

Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program atau kebijakan memang harus dilaksanakan, agar para implementor kebijakan dapat mengetahui dan mengindetifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Sehingga apa yang menjadi sasaran dalam implementasi program atau kebijakan dapat tercapai. Maka dari itu evaluasi merupakan suatu langkah perbaikan terhadap segala proses yang sudah dilakukan dalam melaksanakan program atau kebijakan. Untuk itu evaluasi perlu dilakukan demi mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program atau kebijakan.

Suatu kebijakan diharapkan akan mencapai tujuan yang diharapkan dan pada akhirnya akan mengatasi permasalahan yang

muncul dalam masyarakat. sebagaimana alternatif kebijakan retribusi izin mendirikan bangunan yang di buat dan imlemetasikan di kabupaten mamuju utara yang bertujuan untuk mengendalikan penataan ruang dan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Namun dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 27 tahun 2011 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan, berdasarkan fakta dan observasi yang dilakukan, ditemukan fenomena masih banyak bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan banyak bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan dan rencana tata ruang wilayah kabupaten mamuju utara yang sampai saat ini belum ada tindakan dan upaya pengendalian yang dilakukan oleh instansi terkait. sehingga resposivitas dan kepatutan masyarakat untuk memiliki izin mendirikan bangunan di kabupaten Mamuju Utara masih sangat rendah terhadap bangunan yang dimilikinya. kemudian rendahnya keinginan masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan dari setiap bangunan yang didirikan dapat dilihat berdasarkan data jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai pada tahun 2015 baru 506 unit dari 26.521 atau baru mencapai 2 % dari jumlah bangunan rumah tinggal, gudang maupun tempat usaha yang wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan. hal ini menunjukkan masih tingginya potensi bangunan yang belum dimiliki ijin.

Selain itu, sanksi yang diberikan implemtor kepada masyarakat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam perda tersebut sangat lemah. serta pelaksanaan kebijakan rertribusi izin mendirikan bangunan belum maksimal sehingga berdampak pada pencapaian target retribusi pendapatan asli daerah yang di peroleh, khususnya dari retribusi izin medirikan bangunan. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pembongkaran yang dilakukan aparat

pemerintah, bagi masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan daerah, sehingga dibutuhkan upaya inovasi dan langkah antisipatif dari pihak pemerintah dalam hal ini BPMPTSP Kabupaten Mamuju Utara untuk menjelaskan pentingnya kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan. kemudian dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menggali alternatif pemecahannya, sehingga bisa memberikan pemasukan yang maksimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju Utara.

Dengan berdasar pada berbagaimacam permasalahan terhadap pelaksanaan Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Mamuju Utara. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan fenomena yang terjadi dengan menggunakan teori William N. Dunn sebagai instrumen evaluasi atau pisau analisis terkait evaluasi kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. dengan judul penelitian "*Evaluasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamuju Utara*".

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamuju Utara, tepatnya di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 bulan dimulai awal bulan agustus sampai akhir Oktober 2015.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran gambaran yang komprehensif tentang fokus penelitian yaitu evaluasi kebijakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Mamuju Utara.

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2002:3) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian akan dirancang untuk mengumpulkan informasi

tentang keadaan nyata dengan memberikan gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang akan diteliti. Menurut Singarimbun (1994:4) menyatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun konsep serta menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesa. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan menterjemahkan fakta aktual yang ada di lapangan.

Jumlah informan yang dipilih sebagai sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono (2012:219), yang menyatakan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Jenis data berdasarkan sumbernya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1.) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan dengan menggunakan bantuan pedoman/panduan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) mengacu pada pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah dipersiapkan.; 2.) Data sekunder, adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian atau data yang sudah tersedia, diperoleh melalui buku, dokumen-dokumen atau catatan tertulis yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pedoman telaah dokumen (*document review guide*) sehingga disebut sebagai data dokumenter. Kemudian dianalisis secara bersamaan, menurut Miles dan Huberman (2009:16-20) menyatakan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamuju Utara

Dunn (2003: 28-29) menyatakan bahwa evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihayalkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan atau program, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Lebih lanjut Dunn (2003:608) menghubungkan evaluasi antara nilai dengan hasil kebijakan dan program, bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Untuk kejelasan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). maka akan dikaji berdasarkan teori William N Dunn. dengan menggunakan enam tipe kriteria evaluasi. Keenam tipe kriteria dimaksud adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan.

#### *Efektivitas (effectiveness)*

Evaluasi akan mengungkapkan aspek kesesuaian antara tujuan dan target yang dirumuskan dengan apa yang dicapai. Juga melingkupi aspek usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil. Biasanya aspek usaha ini terkait dengan indikator atau kriteria. Olehnya untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan retribusi IMB dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang diuraikan.

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, S.Sos, M.Si, selaku Kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyatakan, bahwa :

*Kalau dikatakan berhasil menurut saya belum, masih jauh dari tujuan yang diharapkan dari perda, karena dari sisi pencapaian tujuannya belum maksimal masih banyak masyarakat yang belum memiliki IMB. dari kurun waktu 5 tahun perda ini berlaku hanya beberapa persen masyarakat yang memiliki dan mengurus IMB sehingga pencapaian target PAD juga tidak optimal. karena kesungguhan pucuk pimpinan untuk melaksanakan amanat dan tujuan perda tidak maksimal. (Wawancara. Senin, 19 Oktober 2015).*

Berkaitan dengan evaluasi kebijakan retribusi IMB di Kabupaten Mamuju Utara dengan mengacu kepada kriteria Efektivitas, dapat dilihat dari petikan hasil wawancara yang dikemukakan diatas memberikan gambaran, dimana pencapaian hasil yang diharapkan dari kebijakan IMB masih belum maksimal. Artinya masih banyak potensi-potensi IMB yang dimiliki tapi belum digali bagi pelaksana kebijakan. Fakta ini tentunya harus mendapat perhatian serius dari penentu kebijakan dan imlementor agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kurangnya dukungan oleh penentu kebijakan dan kekurang mampuan imlementor dalam melakukan pungutan retribusi IMB disebabkan kurangnya pengawasan oleh isntansi terkait dan imlementor terhadap pelaksanaan perda No. 27 tahun 2011 tentang Retribusi IMB.

### ***Efisiensi (efficiency)***

Efisiensi menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, atau usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. untuk mengetahui tingkat efisiensi kebijakan retribusi IMB dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang diuraikan. Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, S.Sos, M.Si, selaku Kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyatakan, bahwa:

*Pada prinsipnya masyarakat pada umumnya belum sadar akan kewajiban memiliki IMB, keinginan untuk memliki ijin masih sangat terbatas padahal kalau dari pihak perizinan sudah melakukan sosialisasi ketiap kecamatan untuk memperkenalkan perda ini. baik sisi manfaat bagi masyarakat terkait legalitas bangunan yang dimiliki. Maupun bagi daerah tentunya dalam hal peningkatan PAD, yang manfaatnya akan di rasakan juga oleh masyarakat untuk pembiayaan infrastruktur. (Wawancara. Senin, 19 Oktober 2015).*

Hasil wawancara di atas hamper sama dengan yang di ungkapkan oleh beberapa informan lannya yaitu Bapak. Bustanuddin, S.Sos, selaku Plt. Kepala Bidang Perizinan, menyatakan , Bapak Musmuliadi, S.Kom selaku Staf Penerbitan IMB, dan Ibu Nasriaty Natsir, ST, selaku Kepala Bidang Tata Ruang. Semua berpendapat bahwa dari sisi aparatur atau implementor yang memberikan pelayanan IMB di Kabupaten Mamuju Utara, sudah melakukan usaha dalam rangka mencapai tujuan kebijakan IMB, yakni dapat mengontrol jalannya pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara. Hal ini sesuai dengan tujuan penataan ruang, memberikan keseimbangan antara lingkungan dan bangunan di mana izin mendirikan bangunan sebagai sarana agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. namun dalam implementasinya mendapat berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB, di mana hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk sosialisasi, selain itu sumberdaya pelaksana juga masih terbatas, baik dari kualitas maupun kuantitasnya.

Hal ini diperkuat pula dengan hasil wawancara dengan aparatur kelurahan,

Sedikit berbeda dengan hasil yang dikemukakan oleh aparat BPMPTSP dan SKPD teknis terkait, pihak eksternal seperti dari kelurahan sebagaimana dikatakan oleh Bapak. Abunawi, S.Ag. selaku Sekretaris Kelurahan Pasangkayau mengatakan bahwa: *Usaha yang dilakukan oleh implementor kebijakan IMB, belum menunjukkan hasil yang diharapkan dan saya tidak mengatakan baik atau tidaknya koordinasi dengan organisasi lainnya, atau sosialisasi yang dilakukan akan tetapi harusnya kerja sama antar lembaga tetap terjalin terutama kami di pemerintahan paling bawah supaya dapat memahami dan mensosialisasikan bahkan membantu dalam pengurusannya IMB kemasayarakat dengan tujuan dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk mengurus IMB sehingga tujuan penataan ruang tadi bisa dicapai dan pendapatan daerah juga bisa meningkat* (Wawancara, Kamis 5 Nopember 2015).

Hasil tersebut menggambarkan bahwa usaha yang dilakukan oleh implementor belum menunjukkan hasil yang maksimal, artinya belum sepenuhnya masyarakat mengurus IMB di kantor tersebut dan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya IMB masih rendah.

Secara keseluruhan mengimplementasikan IMB di Kabupaten Mamuju Utara kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya IMB rendah sehingga kesadaran untuk mengurus IMB juga belum terlihat. Hal ini memberikan gambaran, bahwa usaha yang dilakukan belum maksimal sehingga hasil yang diinginkan dari kebijakan IMB dapat dilihat dari jumlah yang mengurus IMB masih rendah. Artinya keberadaan kebijakan IMB ini belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga efisiensi kebijakan IMB belum tercapai.

### ***Kecukupan (adequacy)***

Melihat dari suatu tingkatan efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Aspek kecukupan menekankan kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. untuk mengetahui tingkat kecukupan kebijakan retribusi IMB dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang diuraikan.

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, S.Sos, M.Si, selaku Kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyatakan, bahwa: *Menurut saya keberhasilan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator baik aspek internal maupun eksternal, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri serta pemda. Jadi bisa dikatakan bahwa kebijakan ini lahir untuk meminimalisir masalah-masalah publik. Namun apa yang kami hasilkan sekarang ini memang belum maksimal tetapi kami tetap optimis ketika kami didukung oleh penentu kebijakan baik anggaran maupun sumberdaya, maka kami akan melakukan optimalisasi hasil dari kebijakan ini tentunya.* (Wawancara. Senin, 19 Oktober 2015).

Dari uraian hasil wawancara yang dikemukakan di atas menggambarkan bahwa, kebijakan retribusi IMB ini lahir sebagai alternatif masalah yang ada di Kabupaten Mamuju Utara. artinya bahwa dengan keberadaan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses penataan ruang dalam pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara kedepannya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan yang dilakukan masyarakat seperti contoh letak bangunan yang berdekatan dengan badan jalan dan ini tentunya menimbulkan ketidaknyamanan kepada masyarakat. Selain itu sebelum adanya kebijakan ini masih banyak bangunan yang tidak terpantau oleh pemerintah.

Dengan adanya kebijakan retribusi IMB di Kabupaten Mamuju Utara merupakan alternatif pemecahan masalah, akan tetapi dari aspek pencapaian hasil yang diharapkan berdasarkan penelitian di lapangan dan hasil wawancara belum maksimal, dimana dengan adanya kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses penataan ruang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap pembangunan yang dilakukan masyarakat seperti letak bangunan yang berdekatan dengan badan jalan dan banyaknya pembangunan yang belum terpantau hal ini dipertegas berdasarkan data primer, penerbitan IMB sampai pada bulan Nopember tahun 2015 yang ada di BPMPTS baru mencapai 506 unit dari 26.521. artinya masih terdapat 26.015 jumlah potensi bangunan yang harus memiliki izin mendirikan bangunan. jadi dapat disimpulkan berdasarkan dari kriteria kecukupan. kebijakan retribusi IMB belum optimal. dari sisi pengendalian kebijakan. perlu dukungan dari penentu kebijakan serta meningkatkan pengawasan oleh implementor dan SKPD terkait agar meminimalisir masalah yang akan terjadi kedepannya.

### ***Kesamaan (equity)***

Pelaksanaan kebijakan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). seyogyanya haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara merata didistribusikan kepada kelompok sasaran. untuk mengetahui tingkat kesamaan atau pemerataan dari kebijakan retribusi IMB dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang diuraikan.

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, S.Sos, M.Si, selaku Kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyatakan, bahwa :

*Berbicara masalah keadilan dalam pemberian Jasa pelayanan IMB saya kira*

*sampai saat ini kami selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pemohon, tanpa ada membedakan satu sama lain, baik itu waktu ataupun biaya retribusi yang kami berikan karena semua telah diatur secara rinci di dalam perda dan SOP, jadi apa yang dimuat di dalam perda tersebut itulah yang kami implementasikan. (Wawancara. Senin, 19 Oktober 2015).*

Berdasarkan Hasil wawancara yang diuraikan tersebut menggambarkan bahwa, kebijakan retribusi IMB di Kabupaten Mamuju Utara telah dilaksanakan secara merata oleh aparaturnya Badan penanaman modal dan PTSP kepada semua sektor lapisan masyarakat tanpa ada penyimpangan dari isi kebijakan tersebut jadi dapat dikatakan kriteria kesamaan/pemerataan dari kebijakan retribusi IMB sudah baik. namun aspirasi dari masyarakat untuk mendapat keringanan pembayaran retribusi pengurusan izin mendirikan bangunan, menurut analisis sangat menarik dan patut dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi terkait sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut lebih optimal, dan tentunya sektor penerimaan retribusi bagi daerah dapat meningkat. dan dari sisi manfaatnya akan dirasakan pula oleh masyarakat kabupaten mamuju utara.

### ***Responsivitas (responsiveness)***

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas kebijakan dalam hal ini perda tentang retribusi izin mendirikan bangunan. berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Oleh sebab itu untuk mengetahui kriteria responsivitas atas pelaksanaan kebijakan yang dimaksud dapat diterangkan dalam penelitian ini, dengan melihat dari hasil wawancara yang diuraikan.

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, S.Sos, M.Si, selaku Kepala badan

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyatakan, bahwa :

*Terkait dengan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat pada prinsipnya merespon baik, dan merasa puas dengan adanya Perda IMB ini, karena mereka merasa aman dari sisi legalitas bangunan yang dimiliki. Namun ketika kita melihat dari jumlah yang mengurus IMB memang masih jauh dari target capaian retribusi yang telah ditentukan. (Wawancara. Senin, 19 Oktober 2015).*

Kemudian pernyataan hasil wawancara dengan Bapak. Bustanuddin, S.Sos, selaku Plt. Kepala Bidang Perizinan, menyatakan bahwa :

*Kalu kita berbicara respon masyarakat, sebagian sangat merespon dengan adanya kebijakan ini, utamanya bagi mereka yang ingin mengajukan pinjaman, atau yang memang sadar akan pentingnya kepemilikan IMB. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah bangunan rumah penduduk yang ada, memang masih jauh dari harapan karena sampai saat ini masyarakat yang bermohon dan mengurus IMB masih jauh dari target. Hal ini disebabkan masih banyak bangunan yang didirikan tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu. (Wawancara. Senin, 19 Oktober 2015).*

Meyimak hasil pernyataan tersebut menerangkan bahwa pihak dari BPMPTSP yang dalam hal ini pemberi layanan IMB telah menunjukkan ketanggapan mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang dalam hal ini merupakan sasaran kebijakan IMB, karena tujuan dari kebijakan ini sendiri adalah agar masyarakat mengurus IMB sebelum membangun sehingga atas dasar itu aparat sangat mengedepankan daya tanggap, baik dari prosedur maupun sikap yang kami tunjukkan.

Dari segi respon aparat di BPMPTSP dalam memberikan layanan sudah baik, namun dalam hal responsivitas yang diberikan subjek kebijakan belum maksimal, hal ini ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan

Bapak Abunawi, S.Ag selaku Sekretaris Kelurahan Pasangkayau mengatakan bahwa: *Terkait pemberian layanan yang diberikan oleh pegawai di BPMPTSP memang sudah Baik, namun saya melihat dari target atau sasaran kebijakan yang kurang merespon atau patuh terhadap aturan, saya selaku pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung masih melihat adanya pembangunan yang dilakukan masyarakat yang kurang sesuai dengan perencanaan penataan ruang di Kabupaten Mamuju Utara, terutama bagi mereka yang tidak memiliki IMB. (Wawancara, Kamis 5 Nopember 2015).*

Berdasarkan Hasil yang diuraikan menggambarkan bahwa tingkat responsivitas masyarakat dalam mengurus IMB di Kabupaten Mamuju Utara masih sangat rendah. Ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki ijin sehingga tidak sesuai dengan perencanaan penataan ruang serta hasil capaian kinerja implemtor 2 tahun terakhir masih rendah. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat responsivitas masyarakat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penegasan oleh implementor dan SKPD terkait. karena sampai saat ini belum ada bangunan yang mendapat penindakan atau sanksi seperti pembongkaran akibat melanggar ketentuan yang diatur dalam kebijakan. Sehingga banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa melakukan pengurusan ijin terlebih dahulu.

### ***Ketepatan (appropriateness)***

Selanjutnya berkenaan dengan kriteria ketepatan yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program kebijakan IMB di Kabupaten Mamuju Utara. Untuk mengetahui tingkat ketepatan kebijakan ini, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, S.Sos, M.Si, selaku Kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengatakan, bahwa:



*Mengenai ketepatan kebijakan IMB, menurut saya ini merupakan alternatif yang tepat karena keberadaan kebijakan ini sangat mempengaruhi proses pengembangan kabupaten mamuju utara kedepannya, agar dalam melakukan pembangunan menjadi tertata dan terkontrol sebagaimana yang diharapkan dari tujuan kebijakan ini. (Wawancara. Senin, 19 Oktober 2015).*

Uraian hasil yang dikemukakan di atas menggambarkan bahwa dengan keberadaan kebijakan tersebut dapat memberikan jaminan atas pendirian bangunan yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu sebelum adanya kebijakan ini masih banyak bangunan yang tidak terpantau oleh pemerintah, sehingga dengan implementasinya saat ini membuat pembangunan yang didirikan oleh masyarakat baik individu maupun kelompok dapat terpantau.

Ketepatan alternatif kebijakan retribusi IMB di Kabupaten Mamuju Utara yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan PTSP, sudah Baik, di mana dalam implementasinya kebijakan tersebut sudah dijalankan sesuai Peraturan yang ada, karena adanya kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat dalam pengembangan usaha serta dapat mempengaruhi proses penataan ruang dan keseimbangan lingkungan dalam pembangunan kedepannya agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap pembangunan yang dilakukan masyarakat seperti letak bangunan yang berdekatan dengan badan jalan. namun guna optimalisasi kebijakan ini kedepan implementor sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan kepada subjek retribusi dan penyesuaian prasyarat ijin dengan regulasi yang ada. sehingga harapan akan keberhasilan dari kebijakan retribusi izin mendirikan bangunan bisa lebih maksimal dan dapat bergerak secara dinamis, kemudian masyarakat yang akan membangun terlebih dahulu memiliki ijin sehingga tercipta penataan ruang dan pembangunan di

kabupaten mamuju utara yang komprehensif serta berorientasi kepada keseimbangan antara ruang dan lingkungan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan tentang Evaluasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamuju Utara yang dikaji melalui kriteria William N Dunn yang terdiri dari: *Efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan.* Menunjukkan bahwa, kinerja kebijakan belum efektif dimana ditemukan dua aspek atau kriteria evaluasi berkinerja baik yakni, kriteria kesamaan dan kriteria ketepatan, sedangkan empat aspek kriteria evaluasi yang kinerjanya belum optimal adalah: kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan responsivitas.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil evaluasi kebijakan tersebut. maka di rekomendasikan kepada Badan Penanaman Modal dan PTSP selaku implementor, agar meningkatkan Sosialisasi secara intensif, baik melalui program kegiatan atau media cetak dan media massa agar dapat memberikan pemahaman dan merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk segera mengurus IMB sebelum mendirikan atau merubah suatu bangunan. dan perlu meningkatkan pengawasan dengan membentuk Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Izin mendirikan bangunan, selanjutnya penegakan sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan perda. Dengan demikian, peningkatan kinerja kebijakan retribusi izin mendirikan di kabupaten mamuju utara bisa lebih maksimal.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan jurnal ini berkat

motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, penulis ucapkan terima kasih khususnya kepada pembimbing I bapak Dr. Muh. Nawawi, M.Si., dan pembimbing II Bapak Dr. Nawawi Natsir, M.Si., yang selalu memberikan masukan serta penuh kesabaran telah mencurahkan segenap waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas (UI-Press).
- Moleong, Lexy. J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Singarimbun, Masri. 1994. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta LPS3ES.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.